



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda), dimana hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 Oktober 2024;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Dengan keluarnya Keputusan ini diminta kepada OPD pemrakarsa melalui Bupati Lima Puluh Kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Pembahasan Rancangan peraturan daerah dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA,**



Tembusan :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bpk. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat di Padang

PERIHAL : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status Baru Ubah	Pelaksanaan	Disertai NA Penjelasan atau Keterangan	Unit/ Instansi Terkait	Target Pemyampaian	Pemrakarsa	Ket.

1	PERDA Pedoman Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab III Pengakuan, Bab IV Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Bab V Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bab VI Prosedur Tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bab VII Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Bab VIII Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Bab IX Sistem Informasi, Bab X Peran Serta Masyarakat, Bab XI Pembinaan dan Pengembangan, Bab XII Pembiayaan, Bab XIII Penyelesaian Sengketa, Bab XIV Ketentuan Peralihan, Bab XV Ketentuan Penutup	V	Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	V	DLH Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappalitbangda, DPMID/N, Bagian Perekonomian	Maret 2025	DPRD
---	---	---	---	--	---	--	------------	------

2	PERDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029	RPJMD 2025-2029	V	Pemendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Bagian Keempat tata Cara Penyusunan RPJMD Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD Pasal 41)	V		Tim Penyusunan RPJMD	Juni 2025	Bappeltbangda	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Penyaksana	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3	PERDA	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan, Susunan dan Tipeologi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	V		Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		V	Seluruh Perangkat Daerah	November 2025	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	PERDA	Pelestarian Adat Minangkabau di Nagari-Nagari	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharannya oleh pemerintah	V		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V		Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	November 2025	DPRD	
5	PERDA	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	V		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pencetakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	V		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	November 2025	DPRD	
6	PERDA	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	U paya Pemenuhan Hak Anak yang Tertuang di dalam 5 Klastr yakni, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Penguatan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus yang terdiri dari Penguatan Kelembagaan Kabupaten Anak (KLA), Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Penyelenggaraan KLA di Nagari	V		Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	V		Bapelitbangda, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, Dinso, Dispusip, Kesbangpol, Dispora, Disnub, Kemendag, Polres 50 Kota Polres Kota Payakumbuh, LPKA, BAPA, BPS, BKAD, BPBD, Diekominfo, DPMON, Damkar, PU, Disnakertrans, Satpol PP, Bag Hukum, UPTD PPA, DLHPP, PDAM, LKAAM, PKK, Camat se Kabupaten, Forum Anak Daerah	November 2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Diserai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemerakarsa	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		

RANPERDA LUNCURAN PROPEMPERDA TAHUN 2024

1	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	V		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	V		Bapelitbang dan semua OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota	Februari 2025	Bapelitbangda	Proses Evaluasi
2	PERDA	Kawasan Tanpa Rokok	Pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok serta dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan	V		UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	V		Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, badan Kesbangpol, Dinas Sosial, BNN, dan Polres	Februari 2025	Dinas Kesehatan	
3	PERDA	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa	Upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat	V		UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan	V		Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD dr. Achmad Darwis, Polres, Kodim, BPJS, bagian Kesra, Bapelitbangda	April 2025	Dinas Kesehatan	
4	PERDA	Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Sebagai dasar penanganannya perumahan serta penanganan kumuh yang memuat kriteria perumahan, tata cara identifikasi, penilaian, penetapan lokasi, pencegahan kumuh serta peningkatan kualitas permukiman kumuh	V		'UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	V		Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapelitbangda, Bagian Hukum Seida	April 2025	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemerakasa	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5	PERDA	Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharannya oleh pemerintah	V		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V		Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mei 2024	DPRD	
6	PERDA	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Pedoman bagi Pemda dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman	V		UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		BAPELTBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Oktober 2025	BAPELTBANG	
7	PERDA	Pembudayaan Pemuda	Pembudayaan pemuda Pemberian penghargaan Organisasi pemuda di daerah	V		Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan	V		Disparpora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	November 2025	DPRD	
8	PERDA	Keterlibatan Umum dan Ketrnraman Masyarakat	Tertib Bangunan, Pedagang Kaki Lima, Usaha Pariwisata, Kesehatan, Sosial, ASN dan Anak Sekolah, Minuman Beralkohol, Minuman Ramadhan, Tempat hiburan, Iklan dan Reklame, Rumah Kos/ Sewaan, lain Usaha, Keramaian, Penertiban terhadap Pelanggaran atas kegiatan yang Perizannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan/ Pelaksanaan Perda dan Pengenaan Sanksi Denda Administratif	V		PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketrnraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	V		DPM PTSP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	November 2025	DPRD	
9	PERDA	Facilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Jenis Pendidikan Keagamaan Keterliban Masyarakat Bentuk bentuk fasilitas Penghargaan	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Kesra Sekretariat Daerah	November 2025	DPRD	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Diserai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyerapan	Pemrakarsa	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5	PERDA	Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharaannya oleh pemerintah	V		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V		Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mei 2025	DPRD	
6	PERDA	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Pedoman bagi Pemda dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman	V		UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		BAPELTBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Oktober 2025	BAPELTBANG	
7	PERDA	Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan pemuda Pemberian penghargaan Organisasi pemuda di daerah	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kewenangan		V	Disparpora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	November 2025	DPRD	
8	PERDA	Keterlibatan Umum dan Ketertraman Masyarakat	Tertib Bangunan, Pedagang Kaki Lima, Usaha Pariwisata, Kesehatan, Sosial, ASN dan Anak Sekolah, Minuman Beralkohol, Inhalan, Bulan Ramadhan, Tempat hiburan, Iklan dan Reklame, Rumah Kost/ Sewaan, Izin Usaha, Keramaian, Peraturan terhadap Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan/ Pelaksanaan Perda dan Pengenaan Sanksi Denda Administratif	V		PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perundang-Undang Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketertraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	V		DPM PTSP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	November 2025	DPRD	
9	PERDA	Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Jenis Pendidikan Keagamaan Keterlibatan Masyarakat Bentuk-bentuk fasilitas Penghargaan	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Kerja Sekretariat Daerah	November 2025	DPRD	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemeriksaan	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH												
1	PERDA	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	V		PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	V		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda, Bappeditbangda	Juni 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025		V	PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda	September 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	APBD Tahun Anggaran 2026	V		PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda	Oktober 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

